

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Pertumbuhan perekonomian Indonesia tercatat meningkat dari 4,88% pada tahun 2015, menjadi 5,17% pada tahun 2018. Adapun pada semester I tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,06%. Angka pengangguran menurun dari 5,81% pada Februari 2015, menjadi 5,01% pada Februari 2019. Perkembangan penduduk miskin terus menurun dari 11,22% pada Maret 2015, menjadi 9,41% pada Maret 2019, tercatat merupakan angka terendah dalam sejarah NKRI (Sukmana, 2019). Menurut data diatas dengan adanya kenaikan dalam pertumbuhan perekonomian berarti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk Indonesia juga mengalami peningkatan karena PDB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemakmuran suatu Negara atau suatu wilayah. Jika PDB per Kapita kita naik maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu Negara secara keseluruhan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merilis rata-rata pendapatan orang Indonesia per tahun atau pendapatan per kapita mencapai 3.927 dollar AS atau sekitar Rp 56 juta pada tahun 2018. Angka pendapatan tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3.876 dollar AS atau Rp 51,9 juta per tahun atau jika dikalkulasikan sebesar 4,3 juta per bulan. Kenaikan pendapatan per kapita tersebut turut mengantar Indonesia naik peringkat ke kelompok negara dengan pendapatan menengah ke atas (*upper-middle income*) menurut versi Bank Dunia (Olivia, 2019).

Pertumbuhan pendapatan ini berpengaruh pada gaya hidup masyarakat yang cenderung menjadi lebih konsumtif, terutama seiring dengan perkembangan teknologi, manusia terus mengembangkan uang sebagai alat transaksi yang menunjang perekonomian. Manusia mengembangkan uang menjadi alat transaksi digital yang kita kenal sebagai *e-money* atau uang elektronik. Di Indonesia, munculnya uang elektronik dilatarbelakangi oleh Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 11/12/PBI/2009 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan *cashless society*. *Cashless society* adalah suatu tingkah laku masyarakat yang tidak lagi memanfaatkan uang tunai ketika hendak melakukan transaksi keuangan. Pengganti uang tunai, masyarakat tersebut bisa menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau bahkan aplikasi dompet elektronik pada *smartphone*.

Penggunaan uang elektronik di tengah masyarakat, beberapa pihak justru melihat banyaknya penyedia layanan keuangan digital yang kerap memberikan diskon dan *cashback* yang berdampak buruk bagi masyarakat karena akan membuatnya berperilaku konsumtif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat konsumsi rumah tangga selama kuartal II periode April hingga Juni 2018 mencapai angka 5,14 persen. Pencapaian tersebut merupakan angka tertinggi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo karena biasanya tingkat konsumsi berada di kisaran angka 4 persen hingga 5,07 persen (Billy, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2017) dalam tulisannya yang berjudul *Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia*, Rohmah meneliti penggunaan data bulanan uang elektronik dari tahun 2009 sampai tahun 2017 menegaskan bahwa pengaruh penggunaan uang elektronik terhadap perdagangan di Indonesia sebesar 43,9%. Dengan demikian, penggunaan uang elektronik memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap perdagangan di Indonesia yang artinya penggunaan *e-money* yang semakin tinggi meningkatkan perdagangan di Indonesia, hal ini disebabkan karena secara psikologis seseorang akan lebih mudah mengeluarkan uang dalam bentuk nontunai dibanding tunai.

Ditinjau dari segi ekonomi makro, penggunaan uang elektronik akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil khususnya pada sektor perdagangan barang dan jasa. Hal ini apabila dilakukan secara terus menerus, dengan masyarakat yang lebih konsumtif, maka akan muncul suatu masalah dalam keuangan mereka yaitu mereka akan mengalami kesulitan keuangan dan pendapatan yang mereka terima tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus mengetahui dan memahami mengenai pengelolaan keuangan dengan baik.

Masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana mengoptimalkan uang untuk kegiatan yang produktif, disamping itu masyarakat Indonesia juga belum memahami dengan baik berbagai produk layanan jasa keuangan yang ada dan ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal. Pengetahuan keuangan berhubungan dengan literasi keuangan, dimana literasi keuangan merupakan topik penting yang harus dibahas dan dipahami oleh masyarakat Indonesia sehingga bisa bebas dari masalah keuangan. Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), literasi keuangan (*financial literacy*) adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, serta ketrampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, Organisation for Economic

Co-operation and Development atau OECD (2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial well being*) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi (Sulaiman, 2019).

Survei Nasional Literasi Keuangan tahun 2013 yang dilakukan oleh OJK memberikan potret mengenai kondisi literasi keuangan yang ada di Indonesia. Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sekitar 21,8% yang berarti dari setiap 100 penduduk hanya sekitar 22 orang yang termasuk kategori well literate, namun terjadi kenaikan menjadi 29,7% di tahun 2016. Dengan kondisi seperti ini, dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana mengoptimalkan uang untuk kegiatan yang produktif. Di samping itu, masyarakat juga belum memahami dengan baik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal dan lebih tertarik pada tawaran-tawaran investasi lain yang berpotensi merugikan mereka.

Dapat dilihat dari indeks literasi keuangan masyarakat untuk seluruh provinsi di wilayah Indonesia, dari 33 provinsi ternyata hanya 13 provinsi saja yang memiliki indeks literasi keuangan di atas rata-rata nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai seluk beluk keuangan tidak merata pada seluruh provinsi. Gambar dibawah ini adalah tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia setiap provinsi pada tahun 2016.

Grafik1. 1 Indeks Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia Tahun 2016



Sumber : OJK (2017)

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat literasi keuangan tertinggi pada Provinsi DKI Jakarta dengan literasi keuangan sebesar 40% sedangkan terendah pada Provinsi Kalimantan Timur dengan literasi keuangan sebesar 29,7%. Pengetahuan yang tinggi mengenai tingkat literasi keuangan diyakini juga dapat mampu meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang karena dengan bertambahnya tingkat literasi keuangan maka masyarakat dapat membuat keputusan keuangan dengan lebih baik sehingga perencanaan keuangan keluarga atau pribadi menjadi lebih optimal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah sampai saat ini masih berupaya untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia. Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai

bagian dari *the Trilogy of Policy Instrument* dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat (*market confidence*) dan kesetaraan konsumen dan industri jasa keuangan (*level playing field*). Namun demikian, terjadi dinamika dalam beberapa tahun terakhir, yaitu pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi, pergeseran preferensi masyarakat, pertumbuhan kelas menengah serta semakin kompleksnya produk dan layanan jasa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan SNLKI 2013 dalam rangka mengakomodasi perkembangan literasi dan inklusi keuangan serta mengakselerasi pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Penyempurnaan SNLKI 2013 ini diberi nama SNLKI (Revisit 2017) yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang *well literate* dan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan (*financial well being*). Melalui SNLKI (Revisit 2017) ini, OJK mengharapkan kegiatan peningkatan literasi keuangan masyarakat akan dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur dan terkoordinasi (Segara, 2017) Pada tahun 2016 silam hasil dari SNLKI yang dilakukan oleh OJK menunjukkan hanya 29,66% masyarakat Indonesia yang memiliki literasi keuangan yang baik, dan tingkat literasi keuangan pada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hanya sebesar 15,68% (Siregar, 2018).

Usaha Kecil Menengah dan Kelompok Usaha Mikro sangat penting untuk mengetahui dan memahami mengenai literasi keuangan karena agar pengelolaan keuangan usaha dapat berjalan dengan baik dan usaha dapat terus berjalan dan berkembang. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W Martowardjojo mengatakan dalam tingkat literasi keuangan pada UMKM di Indonesia masih sangat rendah.

Salah satu penyebab rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia adalah minimnya akses lembaga keuangan. Permasalahan dalam menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak sebatas manajemen pengelolaan keuangan dan sumber daya yang terbatas saja, namun juga akses permodalan yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Para pelaku UMKM cenderung kurang mengerti produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya, sehingga hanya mampu bergantung pada pembiayaan perbankan yang manual dan konvensional. UMKM juga memiliki peran nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana 60% perekonomian dan 97% ketersediaan lapangan kerja disumbang oleh sektor tersebut. Sehingga pertumbuhan UMKM harus ditopang oleh produk-produk keuangan yang inovatif dan bervariasi. Hal ini juga membantu otoritas dalam program keuangan yang inklusif (Sari, 2016).

Kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto nasional pada tahun 2018 sebesar 60,34% dan naik sebanyak 5% di sepanjang tahun 2019. Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menjelaskan, dengan estimasi pertumbuhan itu, dia meyakini total kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tahun ini dapat mencapai 65% atau sekitar Rp2.394,5 triliun (Syarizka, 2019). Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama (Fauzia, 2019).

Namun dibalik pentingnya peran UMKM dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, ternyata masih sedikit UMKM yang tidak merasakan peran pembiayaan dari lembaga keuangan formal bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Terbukti, hingga saat ini baru sekitar 19%

pelaku UMKM yang menikmati jasa pembiayaan dari lembaga keuangan (Widianto, 2019).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini melakukan beberapa program guna mendorong UMKM untuk meningkatkan akses keuangan UMKM kepada industri jasa keuangan. Antara lain pertama, OJK mendirikan Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (Pelaku) yang telah resmi beroperasi di sejumlah kantor OJK di daerah. Kedua, OJK juga mendirikan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi OJK (OJK-Proksi) untuk meningkatkan akses keuangan UMKM ke industri jasa keuangan. Ketiga, OJK juga melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan serta akses keuangan UMKM. Keempat, OJK juga sudah melakukan revitalisasi modal ventura dalam rangka mendorong peningkatan pendanaan kepada UMKM, terutama start up, yang bergerak di sektor ekonomi kreatif (Julianto, 2016).

Kota Bandung memiliki potensi dalam perkembangan terhadap UMKM dapat dilihat dari jumlah pelaku UMKM di Kota Bandung yang terus meningkat. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Drs Atet Dedi Handiman mengatakan, UMKM Kota Bandung menyumbang sebanyak 80% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Kota Bandung pada tahun 2019 (Puspita, 2019). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM khususnya di Kota Bandung dengan judul '**Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kota Bandung**'.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan pada UMKM di Kota Bandung?
2. Bagaimana tingkat pengelolaan keuangan UMKM di Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat literasi keuangan keuangan UMKM di Kota Bandung.
2. Menganalisis tingkat pengelolaan keuangan UMKM di Kota Bandung.
3. Menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan UMKM di Kota Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, dengan adanya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan masukan dalam melakukan edukasi dan sosialisasi literasi keuangan dan memberikan informasi bahwa literasi keuangan sangat penting untuk kehidupan saat ini maupun pada masa yang akan datang.

2. Bagi UMKM sebagai bahan masukan agar dapat mengevaluasi pengelolaan keuangan usaha dan keuangan pribadi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.
3. Bagi Akademisi sebagai informasi, referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama dan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

